



Kesenjangan dalam Praktik Pengelompokan Peserta Didik dan Implikasinya terhadap Keadilan Pembelajaran

Gian Olivia Putri¹, Dwika Andreano², Muhammad Novrianto³, Linardo Pratama⁴

^{1,2,3,4}Universitas Jambi, Indonesia

Email : gianoliaviaputri@gmail.com¹

Abstract

Student grouping is a common strategy implemented in schools to manage diverse learning abilities and enhance instructional effectiveness. However, in practice, student grouping often creates disparities that affect educational equity. This study aims to comprehensively examine student grouping practices and their implications for equity in learning based on national and international research findings. This study employs a qualitative approach using a literature review method, analyzing various scholarly sources such as journal articles, undergraduate theses, master's theses, and research reports published between 2015 and 2025. Data were analyzed using descriptive content analysis to identify forms of student grouping, emerging disparities, and their impacts on students' academic, social, and psychological dimensions. The findings indicate that ability- or achievement-based grouping tends to widen learning gaps, particularly for students from disadvantaged socioeconomic backgrounds. Additionally, rigid and permanent grouping practices often lead to labeling and stigmatization, which negatively affect students' motivation and learning experiences. Therefore, more flexible and inclusive grouping approaches, supported by differentiated instruction, are necessary to balance equity and effectiveness in learning. This study is expected to contribute to educators' and policymakers' understanding of designing fair and inclusive student grouping practices that address the diverse needs of all learners.

Keywords: *Student Grouping, Ability Grouping, Educational Equity, Learning Disparities, Differentiated Instruction*

Abstrak

Pengelompokan peserta didik merupakan salah satu strategi yang umum diterapkan di sekolah untuk mengelola keberagaman kemampuan belajar dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Namun, dalam praktiknya, pengelompokan peserta didik sering kali menimbulkan kesenjangan yang berdampak pada keadilan pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif praktik pengelompokan peserta didik serta implikasinya terhadap keadilan pembelajaran berdasarkan hasil penelitian nasional dan internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah berupa artikel jurnal, skripsi, tesis, dan laporan penelitian yang dipublikasikan pada periode 2015–2025. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi bentuk pengelompokan peserta didik, kesenjangan yang muncul, serta dampaknya terhadap aspek akademik, sosial, dan psikologis peserta didik. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelompokan berbasis kemampuan atau prestasi akademik berpotensi memperlebar kesenjangan pembelajaran, terutama bagi peserta didik dari latar belakang sosial ekonomi rendah. Selain itu, praktik pengelompokan yang bersifat permanen cenderung memunculkan labelisasi dan stigma yang berdampak negatif terhadap motivasi dan pengalaman belajar peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan

pengelompokan yang lebih fleksibel dan inklusif melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi guna menyeimbangkan prinsip pemerataan dan keadilan pembelajaran. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi pendidik dan pengambil kebijakan dalam merancang praktik pengelompokan peserta didik yang lebih adil dan berpihak pada kebutuhan seluruh peserta didik.

Kata kunci: *Pengelompokan Peserta Didik, Ability Grouping, Keadilan Pembelajaran, Pemerataan Pendidikan, Pembelajaran Berdiferensiasi.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap individu dan menjadi sarana utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks pendidikan modern, keadilan pembelajaran (educational equity) menjadi prinsip fundamental yang harus diwujudkan oleh setiap satuan pendidikan. Keadilan pembelajaran tidak dimaknai sebagai pemberian perlakuan yang sama kepada seluruh peserta didik, melainkan pemberian layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik masing-masing peserta didik agar setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang secara optimal. Salah satu praktik yang umum diterapkan di sekolah untuk mengelola keberagaman kemampuan peserta didik adalah pengelompokan peserta didik. Pengelompokan ini dapat dilakukan berdasarkan berbagai kriteria, seperti usia, prestasi akademik, kemampuan kognitif, minat, maupun pertimbangan administratif. Dalam praktiknya, pengelompokan sering diwujudkan dalam bentuk ability grouping, pengelompokan kelas paralel, maupun pembagian kelompok belajar homogen dan heterogen. Tujuan utama dari pengelompokan tersebut adalah untuk memudahkan guru dalam mengelola pembelajaran, menyesuaikan strategi pengajaran, serta meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar.

Namun, meskipun memiliki tujuan pedagogis yang positif, praktik pengelompokan peserta didik tidak lepas dari berbagai persoalan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengelompokan yang didasarkan terutama pada kemampuan atau prestasi akademik berpotensi menimbulkan kesenjangan pembelajaran, baik dari sisi akademik, sosial, maupun psikologis. Peserta didik yang ditempatkan pada kelompok atau kelas dengan label “unggul” cenderung memperoleh ekspektasi akademik yang lebih tinggi, akses terhadap sumber belajar yang lebih baik, serta perhatian guru yang lebih intensif. Sebaliknya, peserta didik yang berada pada kelompok “rendah” sering kali mendapatkan pembelajaran yang kurang menantang, mengalami penurunan motivasi belajar, serta menghadapi stigma dan labelisasi negatif. Kesenjangan tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan latar belakang sosial ekonomi peserta didik. Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa peserta didik

dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah lebih rentan ditempatkan pada kelompok kemampuan rendah, sehingga memperkuat siklus ketimpangan pendidikan. Dalam jangka panjang, praktik ini dapat menghambat mobilitas sosial dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta inklusivitas pendidikan yang diamanatkan dalam tujuan pembangunan pendidikan global, termasuk Sustainable Development Goal (SDG) 4, yaitu menjamin pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi semua.

Di Indonesia, praktik pengelompokan peserta didik masih banyak dijumpai di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, hingga madrasah. Penelitian-penelitian di tingkat lokal menunjukkan bahwa pengelompokan sering dilakukan atas dasar efisiensi pengelolaan kelas dan capaian akademik, namun belum sepenuhnya mempertimbangkan dampaknya terhadap keadilan pembelajaran. Selain itu, suara dan persepsi peserta didik terhadap praktik pengelompokan sering kali kurang mendapat perhatian, padahal aspek psikologis dan sosial memiliki peran penting dalam keberhasilan belajar. Di sisi lain, perkembangan paradigma pembelajaran modern menekankan pentingnya pembelajaran berdiferensiasi dan pendekatan inklusif sebagai upaya untuk menjawab keberagaman kebutuhan peserta didik tanpa harus menciptakan segregasi yang kaku. Pendekatan ini menuntut guru dan sekolah untuk lebih fleksibel dalam mengelola kelas serta merancang pembelajaran yang adaptif, sehingga prinsip pemerataan dan keadilan pembelajaran dapat berjalan seiring dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai kesenjangan dalam praktik pengelompokan peserta didik dan implikasinya terhadap keadilan pembelajaran menjadi sangat penting untuk dilakukan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep dan praktik pengelompokan peserta didik, mengidentifikasi bentuk-bentuk kesenjangan yang muncul, serta menganalisis dampaknya terhadap keadilan pembelajaran berdasarkan hasil penelitian nasional dan internasional. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pengelompokan yang adil dan inklusif sebagai dasar dalam merumuskan strategi pembelajaran yang berpihak pada kebutuhan seluruh peserta didik.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan

menganalisis secara mendalam fenomena pengelompokan peserta didik serta implikasinya terhadap keadilan pembelajaran, bukan untuk mengukur hubungan sebab-akibat secara statistik. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai konsep, teori, dan temuan empiris yang telah dipublikasikan sebelumnya sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik pengelompokan peserta didik dalam berbagai konteks pendidikan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membandingkan praktik pengelompokan yang diterapkan di sekolah dasar, sekolah menengah, dan madrasah, serta mengaitkannya dengan prinsip pemerataan dan diferensiasi pembelajaran.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data penelitian bersumber dari data sekunder berupa artikel jurnal nasional dan internasional, skripsi, tesis, serta laporan penelitian yang relevan dengan topik pengelompokan peserta didik dan keadilan pembelajaran. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan kriteria kesesuaian topik, kredibilitas sumber, serta rentang waktu publikasi antara tahun 2015 hingga 2025. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap database jurnal ilmiah dan repository perguruan tinggi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) secara deskriptif-analitis dengan cara mengidentifikasi bentuk-bentuk pengelompokan peserta didik, tujuan penerapannya, dampak yang ditimbulkan, serta implikasinya terhadap keadilan pembelajaran. Hasil analisis selanjutnya disintesis untuk menghasilkan kesimpulan yang utuh dan relevan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Praktik Pengelompokan Peserta Didik

Hasil kajian terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa praktik pengelompokan peserta didik masih menjadi strategi yang dominan dalam pengelolaan kelas di sekolah, baik pada jenjang sekolah dasar, menengah, maupun madrasah. Pengelompokan dilakukan dengan beragam bentuk, antara lain pengelompokan berdasarkan prestasi akademik, kemampuan kognitif (ability grouping), kelas paralel, serta pengelompokan homogen dan heterogen dalam kegiatan pembelajaran.

Penelitian di konteks sekolah dasar dan menengah di Indonesia menunjukkan bahwa pengelompokan paling sering didasarkan pada prestasi belajar dan hasil evaluasi akademik. Sekolah cenderung membagi peserta didik ke dalam kelas atau kelompok “unggul”, “sedang”, dan “rendah” dengan tujuan memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan

menyesuaikan tingkat kesulitan pembelajaran. Praktik serupa juga ditemukan di madrasah, di mana pengelompokan kelas dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan pencapaian hasil belajar.

Namun demikian, temuan-temuan tersebut juga menunjukkan bahwa pengelompokan sering kali lebih berorientasi pada efisiensi pengelolaan kelas dibandingkan pada prinsip keadilan pembelajaran. Aspek kebutuhan individual peserta didik, latar belakang sosial, serta dampak jangka panjang terhadap pengalaman belajar siswa belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama.

Kesenjangan Akademik akibat Pengelompokan Peserta Didik

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa pengelompokan berbasis kemampuan atau prestasi memiliki implikasi yang signifikan terhadap kesenjangan akademik. Peserta didik yang ditempatkan pada kelompok atau kelas dengan capaian akademik tinggi cenderung memperoleh pembelajaran yang lebih menantang, penggunaan metode yang variatif, serta ekspektasi guru yang lebih tinggi. Kondisi ini mendorong berkembangnya potensi akademik siswa secara optimal.

Sebaliknya, peserta didik yang berada pada kelompok berprestasi rendah sering kali mengalami pembelajaran yang bersifat repetitif dan remedial, dengan tuntutan akademik yang lebih rendah. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menghambat perkembangan kemampuan peserta didik dan memperkuat kesenjangan hasil belajar antar kelompok. Penelitian internasional juga menguatkan temuan ini dengan menunjukkan bahwa ability grouping berpotensi memperlebar *achievement gap*, terutama bagi peserta didik dari latar belakang sosial ekonomi rendah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pengelompokan bertujuan untuk menyesuaikan pembelajaran, penerapannya yang kaku justru dapat membatasi kesempatan belajar peserta didik tertentu dan bertentangan dengan prinsip pemerataan pendidikan.

Dampak Sosial dan Psikologis Pengelompokan

Selain kesenjangan akademik, hasil kajian menunjukkan bahwa pengelompokan peserta didik juga berdampak pada aspek sosial dan psikologis. Penelitian mengenai persepsi peserta didik terhadap pengelompokan kelas mengungkapkan bahwa siswa yang ditempatkan pada kelompok rendah sering mengalami penurunan motivasi belajar, rasa percaya diri, dan partisipasi aktif dalam pembelajaran.

Labelisasi sebagai “siswa lemah” atau “kelas bawah” berkontribusi terhadap terbentuknya stigma negatif yang memengaruhi interaksi sosial antar peserta didik. Kondisi

ini tidak hanya berdampak pada proses belajar di kelas, tetapi juga pada pembentukan identitas diri dan sikap peserta didik terhadap sekolah. Sementara itu, peserta didik di kelompok atas cenderung mengembangkan rasa percaya diri yang lebih tinggi, namun berisiko kurang memiliki empati dan kemampuan bekerja sama dengan teman yang memiliki kemampuan berbeda.

Temuan ini sejalan dengan penelitian internasional yang menyatakan bahwa pengelompokan berbasis kemampuan dapat menciptakan segregasi sosial di lingkungan sekolah dan memperkuat ketimpangan antar peserta didik.

Pengelompokan dan Keadilan Pembelajaran

Diskusi hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelompokan peserta didik memiliki hubungan yang kompleks dengan konsep keadilan pembelajaran. Keadilan pembelajaran menuntut agar setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara sesuai dengan kebutuhannya. Namun, pengelompokan yang bersifat permanen dan berbasis kemampuan akademik semata sering kali menghasilkan perlakuan yang tidak setara.

Penelitian internasional mengenai attainment grouping dan ability grouping menunjukkan bahwa peserta didik dari kelompok sosial ekonomi rendah lebih sering ditempatkan pada kelompok kemampuan rendah. Hal ini memperlihatkan bahwa pengelompokan tidak hanya mencerminkan kemampuan akademik, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural dan sosial. Akibatnya, praktik ini berpotensi memperkuat ketidakadilan pendidikan dan menghambat upaya pencapaian pendidikan yang inklusif dan adil sebagaimana diamanatkan dalam SDG 4.

Upaya Alternatif: Pengelompokan Fleksibel dan Pembelajaran Berdiferensiasi

Hasil kajian juga mengidentifikasi berbagai alternatif yang dapat diterapkan untuk mengurangi kesenjangan akibat pengelompokan peserta didik. Salah satu pendekatan yang direkomendasikan adalah pengelompokan fleksibel, di mana peserta didik dapat berpindah kelompok sesuai dengan perkembangan kemampuan dan kebutuhan belajarnya. Pendekatan ini dinilai lebih adil karena tidak memberikan label permanen kepada peserta didik.

Selain itu, penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas heterogen menjadi strategi penting untuk mewujudkan keadilan pembelajaran. Dengan diferensiasi konten, proses, dan produk pembelajaran, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam tanpa harus memisahkan mereka secara kaku berdasarkan kemampuan. Diskusi ini menunjukkan bahwa keadilan pembelajaran tidak harus dicapai melalui pemisahan peserta

didik, melainkan melalui pengelolaan pembelajaran yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada perkembangan individu.

Sintesis Diskusi

Secara keseluruhan, hasil dan diskusi penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengelompokan peserta didik memiliki dampak yang multidimensional. Di satu sisi, pengelompokan dapat membantu efektivitas pembelajaran dan pengelolaan kelas. Namun, di sisi lain, praktik ini berpotensi menimbulkan kesenjangan akademik, sosial, dan psikologis yang bertentangan dengan prinsip keadilan pembelajaran.

Oleh karena itu, pengelompokan peserta didik perlu dipandang secara kritis dan kontekstual. Sekolah dan pendidik perlu memastikan bahwa praktik pengelompokan tidak menjadi alat segregasi, melainkan sarana untuk mendukung pembelajaran yang adil, inklusif, dan berpihak pada kebutuhan seluruh peserta didik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang mencakup berbagai penelitian nasional dan internasional pada periode 2015–2025, dapat disimpulkan bahwa pengelompokan peserta didik merupakan praktik yang masih sangat dominan dalam sistem pendidikan dan digunakan sebagai strategi untuk mengelola keberagaman kemampuan peserta didik di dalam kelas. Pengelompokan tersebut umumnya dilakukan berdasarkan prestasi dan kemampuan akademik, baik melalui ability grouping, pembagian kelas paralel, maupun pengelompokan homogen dalam proses pembelajaran. Praktik ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran serta memudahkan guru dalam menyampaikan materi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan pengelompokan peserta didik yang tidak dirancang secara cermat dan berorientasi pada keadilan pembelajaran justru berpotensi menimbulkan berbagai bentuk kesenjangan. Kesenjangan tersebut tidak hanya terjadi pada aspek akademik, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan psikologis peserta didik. Peserta didik yang ditempatkan pada kelompok kemampuan tinggi cenderung memperoleh kesempatan belajar yang lebih luas, tantangan akademik yang lebih tinggi, serta ekspektasi positif dari guru. Sebaliknya, peserta didik yang berada pada kelompok kemampuan rendah sering kali mengalami pembelajaran yang kurang menantang, penurunan motivasi belajar, serta dampak negatif berupa labelisasi dan rendahnya rasa percaya diri. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperkuat

kesenjangan hasil belajar dan membatasi peluang peserta didik untuk berkembang secara optimal.

Kajian ini juga menegaskan bahwa praktik pengelompokan peserta didik tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial ekonomi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peserta didik dari latar belakang sosial ekonomi rendah lebih rentan ditempatkan pada kelompok kemampuan rendah, sehingga pengelompokan tidak hanya mencerminkan perbedaan kemampuan akademik, tetapi juga mereproduksi ketimpangan sosial dalam sistem pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelompokan peserta didik merupakan isu struktural yang berkaitan erat dengan prinsip pemerataan dan keadilan pendidikan, serta berpotensi bertentangan dengan upaya mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pembangunan pendidikan global. Dalam perspektif keadilan pembelajaran, hasil kajian ini menegaskan bahwa keadilan tidak identik dengan perlakuan yang sama bagi seluruh peserta didik, melainkan pemberian layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing individu. Namun, pengelompokan peserta didik yang bersifat permanen dan kaku sering kali membatasi akses peserta didik tertentu terhadap pengalaman belajar yang bermakna dan menantang. Oleh karena itu, praktik pengelompokan semacam ini perlu dikaji ulang agar tidak menjadi sarana segregasi yang justru menghambat pemerataan kualitas pendidikan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk menyeimbangkan antara efektivitas pembelajaran dan keadilan pendidikan memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan reflektif dalam pengelompokan peserta didik. Pengelompokan fleksibel yang memungkinkan perpindahan kelompok sesuai perkembangan kemampuan peserta didik, serta penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas heterogen, merupakan strategi yang lebih selaras dengan prinsip keadilan pembelajaran. Pendekatan ini tidak hanya berpotensi mengurangi kesenjangan akademik, tetapi juga mendukung perkembangan sosial dan emosional peserta didik melalui interaksi yang lebih inklusif dan saling menghargai. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pengelompokan peserta didik seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi pengelolaan kelas, melainkan harus dirancang sebagai bagian dari strategi pedagogis yang berpihak pada kebutuhan dan perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Sekolah dan pendidik perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari praktik pengelompokan terhadap keadilan pembelajaran, serta mengintegrasikan prinsip inklusivitas dan diferensiasi dalam setiap kebijakan dan praktik pembelajaran. Melalui pendekatan tersebut, pengelompokan peserta didik diharapkan dapat berkontribusi secara

positif dalam mewujudkan pendidikan yang adil, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, M. Y. (2019). *Sistem pengelompokan kelas peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Negeri* (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya). Repository UIN Sunan Ampel. http://digilib.uinsa.ac.id/41914/2/muhammad%20yusuf%20andrianto_d03215021.pdf
- Novita, A. (2018). *Manajemen peserta didik dalam pengelompokan belajar siswa* (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh). Repository UIN Ar-Raniry. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5075/1/Andira%20Novita.pdf>
- Taylor, B., Francis, B., Archer, L., Hodgen, J., Mazonod, A., Pepper, D., & Travers, M. C. (2019). *Attainment grouping in schools: Implications for equity*. UCL Institute of Education. <https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10148043/1/Taylor%20et%20al%20PKU%20attainment%20grouping%20FINAL.pdf>
- Wibowo, A., & Nurhadi. (2017). Sistem pengelompokan peserta didik di sekolah dasar negeri. *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 1(2), 123–131. <https://journal2.um.ac.id/index.php/jmsp/article/download/1878/1108>
- Yuliani, S. (2016). Penerapan pengelompokan siswa berdasarkan prestasi. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 5(1), 45–56. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/psikologi/article/download/10609/8443>
- Zahra, R. (2018). Pengaruh persepsi peserta didik mengenai pengelompokan kelas terhadap motivasi belajar. *Journal of Social Science and Education*, 2(1), 88–97. <https://sjee.unbari.ac.id/index.php/ojssjee/article/download/169/162>
- Sari, D. P. (2017). Implementasi model pengelompokan peserta didik dalam kelas paralel. *Jurnal Pendidikan*, 9(2), 134–145. <https://eprints.ums.ac.id/51238/1/artikel%20publikasi%20publikasi.pdf>
- Rahmawati, L. (2020). Pengaturan pengelompokan peserta didik pada lembaga pendidikan formal. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Bimbingan*, 6(1), 55–66. <https://ifrelresearch.org/index.php/jmpb-widyakarya/article/download/957/993>
- Francis, B., Taylor, B., & Archer, L. (2024). Does within-school between-class ability grouping harm disadvantaged students? *European Sociological Review*, 41(5), 722–739. <https://academic.oup.com/esr/article/41/5/722/7925690>

Mazenod, A., & Francis, B. (2024). Why do schools continue to use between-class ability grouping? *Research in Education*, 112(1), 1–17.

<https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11125-024-09710-y.pdf>

Francis, B., Taylor, B., Archer, L., & Mazenod, A. (2025). If, and how, to group by “ability”: Implications for educational equity. *Oxford Review of Education*.

<https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03055698.2025.2511914>